

**STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS**  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**OLEH**  
**NUR ANNISA PUTRI NAZARUDDIN**



**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**

**2024**

**STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS**  
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**NUR ANNISA PUTRI NAZARUDDIN**

**E021201088**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada  
Departemen Ilmu Komunikasi*

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Strategi Komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik  
Nama Mahasiswa : Nur Annisa Putri Nazaruddin  
Nomor Pokok : E021201088  
Departemen : Ilmu Komunikasi

Makassar, 21 Februari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Dr. Sudirman Karnay, M.Si

NIP. 196410021990021001

  
Sartika Sari Wardanhi DHP, S.Sos., M.Ikom.

NIP. 198711232019032010

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Komunikasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. Sudirman Karnay, M.Si

NIP. 196410021990021001

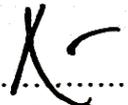
## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Telah Diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Departemen Ilmu Komunikasi Konsentrasi *Public Relations* Pada Hari

Makassar, 21 Februari 2024

### TIM EVALUASI

Ketua : Dr. Sudirman Karnay, M.Si

(.....)

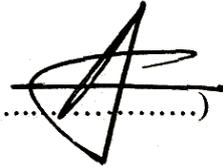
Sekretaris : Sartika Sari Wardanhi DHP, S.Sos., M.I.Kom.

(.....)

Anggota : 1. Dr. Moeh. Iqbal Sultan, M.Si.

(.....)

2. Dr. H. Muh. Akbar, M.Si.

(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Annisa Putri Nazaruddin

NIM : E021201088

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Jenjang : S1

Saya menyatakan bahwa skripsi komunikasi yang berjudul **"Strategi Komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik"** ini sepenuhnya adalah karya sendiri. Tidak ada bagian didalamnya yang merupakan duplikasi dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan dalam skripsi ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Makassar, 21 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Nur Annisa Putri Nazaruddin

## ABSTRAK

**NUR ANNISA PUTRI N. E021201088.** *Strategi Komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik. (Dibimbing oleh Sudirman Karnay dan Sartika Sari Wardanhi DHP).*

Tujuan penelitian ini: (1) Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara RI dalam implementasi keterbukaan informasi publik (2) Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi oleh Humas Kementerian Sekretariat Negara RI dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang dilakukan pada bulan Agustus hingga Desember 2023 dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada *Staff* Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil sumber data berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari buku, internet, dll.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik melakukan 4 (empat) tahapan strategi komunikasi yang terdiri dari: 1) Penemuan Fakta (*fact finding*): Pada tahap ini Humas Kemensetneg mengacu pada dasar hukum yang telah mengikat dan melakukan peninjauan kembali dari hasil upaya-upaya yang telah dikerjakan sebelumnya. 2) Perencanaan (*planning*): Humas Kemensetneg melakukan perencanaan dengan memperhatikan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, media, sasaran, dan efek. 3) Aksi dan Komunikasi (*action and communication*): Tahap ini Humas Kemensetneg melakukan upaya-upaya yang dapat menunjang keterbukaan informasi publik, seperti transformasi pelayanan informasi publik, diseminasi informasi melalui berbagai media, dan membangun relasi dan berkolaborasi dengan *stakeholders*. 4) Evaluasi (*evaluation*): Pada tahap ini dilakukannya evaluasi dari pelaksanaan yang telah dikerjakan. Evaluasi dilakukan secara internal melalui rapat koordinasi dan secara eksternal yang dilakukan oleh Komisi Informasi melalui Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan setiap tahunnya.

Kata kunci : Strategi komunikasi, keterbukaan informasi publik, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

## ***ABSTRACT***

**NUR ANNISA PUTRI N.** E021201088. *Public Relations Communication Strategy of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia in Implementing Public Information Disclosure. (Supervised by Sudirman Karnay and Sartika Sari Wardanhi DHP).*

The objectives of this research are: (1) To describe the Public Relations communication strategy of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia in implementing public information disclosure. (2) To describe the inhibiting factors faced by Public Relations of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia in implementing public information disclosure.

This type of research uses a descriptive qualitative method which was carried out from August to December 2023 by conducting in-depth interviews with the Public Relations Bureau Staff of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. Data collection techniques are carried out by taking data sources in the form of primary data obtained from interviews and observations as well as secondary data obtained from books, the internet, etc.

The results of the research show that the Public Relations communication strategy of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia in implementing public information disclosure carries out 4 (four) stages of communication strategy consisting of: 1) Fact finding: At this stage the Public Relations of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia refers to the binding legal basis and reviewing the results of previous efforts. 2) Planning: Public Relations of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia carries out planning by paying attention to communication elements such as communicators, messages, media, targets and effects. 3) Action and Communication: This stage, the Public Relations of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia makes efforts that can support the of public information disclosure, such as transforming public information services, disseminating information through various media, and building relationships and collaborating with stakeholders. 4) Evaluation: At this stage, an evaluation of the implementation that has been carried out is carried out. Evaluation is carried out internally through coordination meetings and externally by the Central Information Commission of the Republic of Indonesia through Monitoring and Evaluation of Public Information Disclosure which is carried out every year.

Keywords: Communication strategy, public information disclosure, Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara RI dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik” sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada jenjang Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri tauladan bagi umat manusia yang menjadi penuntun setiap manusia dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini begitu banyak hambatan yang dihadapi, akan tetapi semuanya dapat teratasi dengan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Nazaruddin Anwar, S.Sos dan Ibunda Feriyani yang senantiasa memberi dukungan serta mencurahkan kasih sayang, nasihat, dan doa tak terhingga sehingga penulis dapat berada di titik ini hingga menyelesaikan pendidikan jenjang S1. Terima kasih juga kepada adik-adik kesayangan penulis, Pipit, Abang, Asyifa, dan Alm. Aisyah yang telah menjadi penyemangat dan alasan kuat untuk penulis bertahan sejauh ini.

Melalui kesempatan berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat membantu penulis, baik dari segi moril maupun materi, dukungan, serta

doa kepada penulis sehingga penulis mampu melalui lika-liku studi S1, terima kasih kepada :

1. Ketua Departemen Ilmu Komunikasi sekaligus selaku pembimbing 1, bapak Dr. Sudirman Karnay, M.Si. yang senantiasa membimbing dan memberikan saran, kritik dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Dosen Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik (PA), Ibu Sartika Sari Wardanhi, S.Sos., M.Si. yang senantiasa mengarahkan penulis, memberikan saran maupun kritik dari semester 1 hingga sampai pada tahap penyelesaian tugas akhir.
3. Sekretaris Departemen Ilmu Komunikasi, bapak Nosakros Arya, S.Sos, M.Si yang telah membantu secara administratif proses perkuliahan dan penyelesaian studi penulis, serta telah memberi dukungan dan nasehat kepada penulis.
4. Seluruh pengajar/dosen maupun staf akademik Departemen Ilmu Komunikasi yang telah memberikan harta paling berharga selama masa perkuliahan berupa ilmu pengetahuan dan nasihat kepada penulis.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang tiada henti memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. Sahabat till Jannah, one and only Taya yang setia menemani setiap proses yang penulis hadapi. Terima kasih telah memberi dukungan dan kasih sayang yang tulus, serta tanpa lelah mendengarkan keluh kesah penulis. Mari terus melangkah bersama-sama untuk mewujudkan semua impian.

7. Teman-teman toxic nan baik hati, Mayo, Deloy, Susoy yang telah bersama-sama melalui suka duka perkuliahan dan perkosmikan. Terima kasih atas support dan bantuan yang telah diberikan sejak awal drama per *booklet*-an hingga pada masa selesainya studi ini.
8. Mas-Mas Sudiang yang sangat memotivasi penulis untuk terus berproses. Terima kasih telah membantu dan menemani penulis di masa-masa sulit dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih untuk semua hal random yang penuh kesan dan *insightful*.
9. Teman seperjuangan PR, wanita-wanita kuat yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Rahmi, Amel, dan Fera terima kasih telah berbagi suka dan duka kehidupan yang sangat berlika-liku. Terima kasih juga telah membantu penulis selama masa perkuliahan. Sehat selalu dan terus bertahan demi mimpi yang terwujud.
10. Kakak-kakak pakbal nan baik hati, Kak Mila, Kak Imo, dan Kak Dion yang telah memberi dukungan, bantuan, dan nasihat kepada adik kecilnya.
11. Teman-teman Nalendra yang telah saling membantu satu sama lain, berbagi pengalaman dan cerita selama masa perkuliahan. Terutuk kalian semua, 106 orang semoga makin sukses dan solid.
12. Serta seluruh rekan-rekan penulis yang tidak tertulis secara spesifik terima kasih telah memberikan bantuan dan dukungan dari awal kepada penulis.

13. Terakhir, teruntuk diri sendiri apresiasi sebesar-besarnya karena telah berhasil menyelesaikan apa yang telah dimulai sejak awal. Terima kasih telah berusaha dengan keras dan tidak menyerah dalam menjalani lika-liku kehidupan. Tetap berjuang dan bersyukur atas apa yang telah diraih.

Akhir kata, penulis persembahkan skripsi ini kepada semua pembaca, semoga bermanfaat dan berguna untuk semuanya. Tak lupa permohonan maaf penulis hanturkan atas segala kekurangan dalam penyusunan. *Wassalamu alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 21 Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN EVALUASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual .....	12
E. Definisi Konseptual .....	22
F. Metode Penelitian .....	23
G. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Strategi Komunikasi .....	26
B. Hubungan Masyarakat .....	34
C. Keterbukaan Informasi Publik.....	40
D. Komisi Informasi.....	43

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

A. Profil Kementerian Sekretariat Negara.....	47
B. Visi dan Misi .....	48
C. Tugas dan Fungsi Kementerian Sekretariat Negara .....	50
D. Struktur Organisasi Biro Humas Kemensetneg.....	52

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Informan .....	54
B. Hasil Wawancara.....	55
C. Pembahasan .....	89

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	108

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 110**

### **LAMPIRAN..... 113**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Berita kasus sengketa informasi Kemensetneg .....	5
Gambar 1.2 Grafik Nilai Hasil MONEV Keterbukaan Informasi Publik .....	7
Gambar 1.3 Kerangka Pikir.....	21
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Sekretariat Negara .....	47
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Biro Humas Kemensetneg .....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PPID Kemensetneg .....	60
Gambar 4.2 Alur Penanganan Informasi Publik .....	63
Gambar 4.3 Menu PPID dan Informasi Publik Pada Website .....	64
Gambar 4.4 Jadwal Pelayanan Informasi Publik Kemensetneg.....	65
Gambar 4.5 Tautan QR Code Pelayanan Informasi Publik .....	68
Gambar 4.6 Laporan Akses Informasi Kemensetneg Tahun 2022 .....	69
Gambar 4.7 Kegiatan Setneg Mantul <i>Goes To Campus</i> .....	73
Gambar 4.8 Kegiatan Setneg Mantul <i>Road To G20</i> edisi Bali .....	73
Gambar 4.9 Konten Setneg Sepekan.....	74
Gambar 4.10 Konten Rilis Presiden.....	75
Gambar 4.11 Konten Setneg Proaktif .....	76
Gambar 4.12 SetnegPedia .....	77
Gambar 4.13 Konten SetnegReal .....	78
Gambar 4.14 Kegiatan Lokakarya PPID Kemensetneg .....	82
Gambar 4.15 Penerimaan Kunjungan Mahasiswa UGM.....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan perkembangan teknologi yang hadir mengakibatkan adanya perubahan kebutuhan setiap individu. Salah satu aspek yang paling dibutuhkan dan terus mengalami perkembangan seiring perubahan zaman adalah komunikasi. Komunikasi tentu tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, dimanapun manusia berada pasti membutuhkan komunikasi. Dengan komunikasi, kita dapat memahami dan memperoleh pengetahuan. Adapun perubahan kebutuhan dalam aspek komunikasi yakni terlihat dari semakin canggihnya teknologi, maka meningkat pula keinginan individu untuk mendapatkan informasi yang cepat dan mudah.

Kebutuhan informasi sangat menunjang pengetahuan setiap individu dalam proses kehidupan sehari-hari ataupun dalam konteks bernegara. Sebagai warga negara, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi. Hal ini telah tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta berkomunikasi dengan menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia.

Indonesia sebagai negara demokrasi mengharuskan setiap elemen di dalamnya mampu melakukan penyelenggaraan negara yang terbuka dan transparan, seperti halnya penyediaan informasi. Hal ini dilakukan demi meningkatkan ketahanan nasional serta terciptanya siklus yang harmonis antara hak masyarakat dengan kewajiban lembaga pemerintah. Keterbukaan informasi

publik adalah pondasi awal dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, transparan, terbuka, dan partisipasi dalam seluruh proses penyelenggaraan negara (Nurdiansyah E. , 2016).

Keterbukaan informasi telah diatur pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendorong akses masyarakat terhadap informasi yang dipegang oleh badan publik. Setiap badan publik wajib memberikan informasi publik yang dimilikinya kepada setiap pemohon informasi serta menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala.

Melihat realitas saat ini, hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik masih belum terpenuhi dengan baik. Dapat dilihat dari banyaknya keluhan, kritik, ataupun saran dari masyarakat yang tidak ditanggapi dengan baik. Masyarakat memiliki hak dalam menyampaikan kritik ataupun saran terkait penyelenggaraan negara yang kiranya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, perlu diukur sejauh mana optimalisasi yang dilakukan badan publik dalam mengupayakan keterbukaan informasi publik.

Dengan adanya undang-undang yang telah mengikat, maka masyarakat dapat mengakses informasi sesuai dengan kategori informasi yang diperbolehkan oleh undang-undang tersebut dari badan publik terkait melalui bagian kehumasan. Serta badan publik juga memiliki kewajiban dalam memberikan informasi tersebut kepada pemohon informasi. Apabila masyarakat tidak mendapatkan informasi yang diminta, maka masyarakat dapat mensengketakan hal tersebut.

Badan publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang dalam menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara negara, segala bentuk dana yang digunakan baik sebagian ataupun keseluruhan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau organisasi non pemerintah yang juga sebagian ataupun seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri (Novita, 2019).

Kementerian Sekretariat Negara RI atau biasa disingkat Kemensetneg dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan Kementerian Sekretariat Negara RI merupakan salah satu badan publik yang memiliki kewajiban melakukan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Kemensetneg juga memiliki tuntutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang bersifat transparansi, akuntabilitas, dan mendorong partisipasi masyarakat.

Seperti yang diketahui, Kementerian Sekretariat Negara merupakan kementerian yang posisinya paling dekat dengan Presiden sehingga menjadi lembaga pemerintah yang mencakup segala aspek terkait dengan proses penyelenggaraan negara. Kemensetneg memiliki tugas untuk memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaannya.

Guna mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara optimal, Kementerian Sekretariat

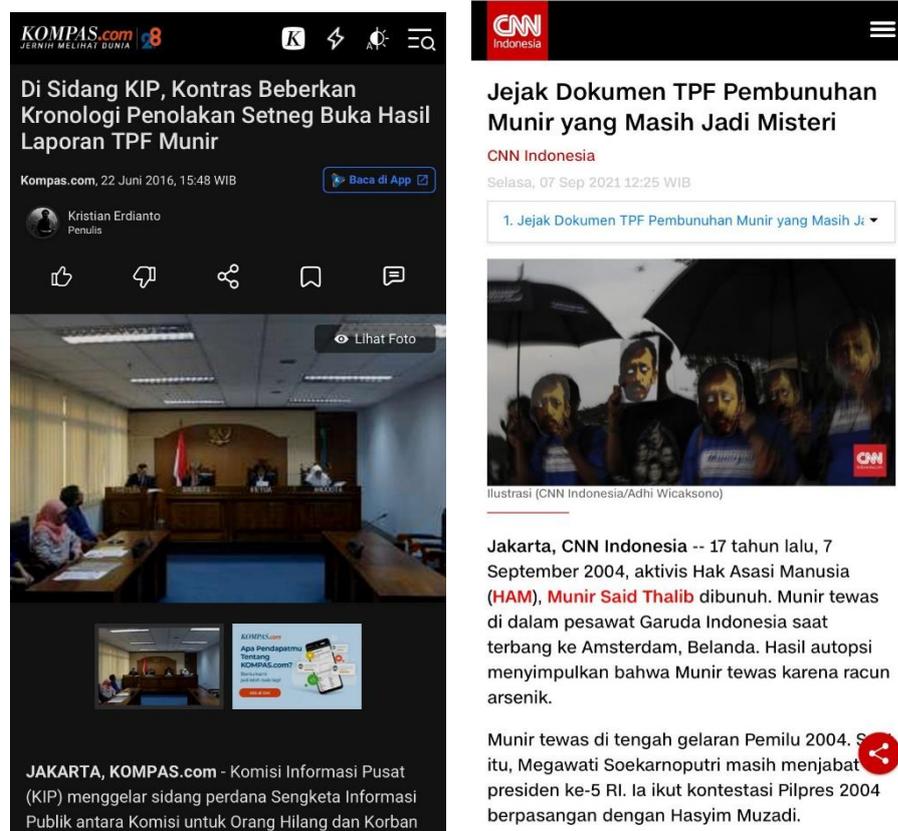
Negara memiliki kewajiban yang harus dilakukan seperti memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi, menyediakan informasi publik yang akurat dan mudah dijangkau, serta patuh terhadap undang-undang tersebut.

Pelayanan informasi yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara RI juga tak hanya sebatas lingkup Kemensetneg saja, tetapi meliputi Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kementerian dan Kedepatian, Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Kantor Staf Presiden, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno, dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Dapat dilihat bahwa Kemensetneg memiliki beragam informasi yang sangat strategis terkait penyelenggaraan negara. Maka dari itu, tidak heran jika banyak masyarakat yang mengajukan permohonan kebutuhan informasi dari Kementerian Sekretariat Negara RI.

Untuk menunjang implementasi keterbukaan informasi publik, dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 telah mengamanatkan lembaga independen Komisi Informasi yang bertugas menyelesaikan sengketa informasi, menetapkan standar teknis layanan informasi publik di lingkungan badan publik, serta melakukan pengawasan kepada setiap badan publik dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka.

Keterbukaan informasi publik bukanlah hal yang dapat disepelekan karena merupakan inti dari sistem demokrasi yang menjadi unsur penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu contoh kasus yang pernah dihadapi oleh Kemensetneg terkait keterbukaan informasi publik yang berujung adanya sengketa informasi, yakni permohonan informasi hasil

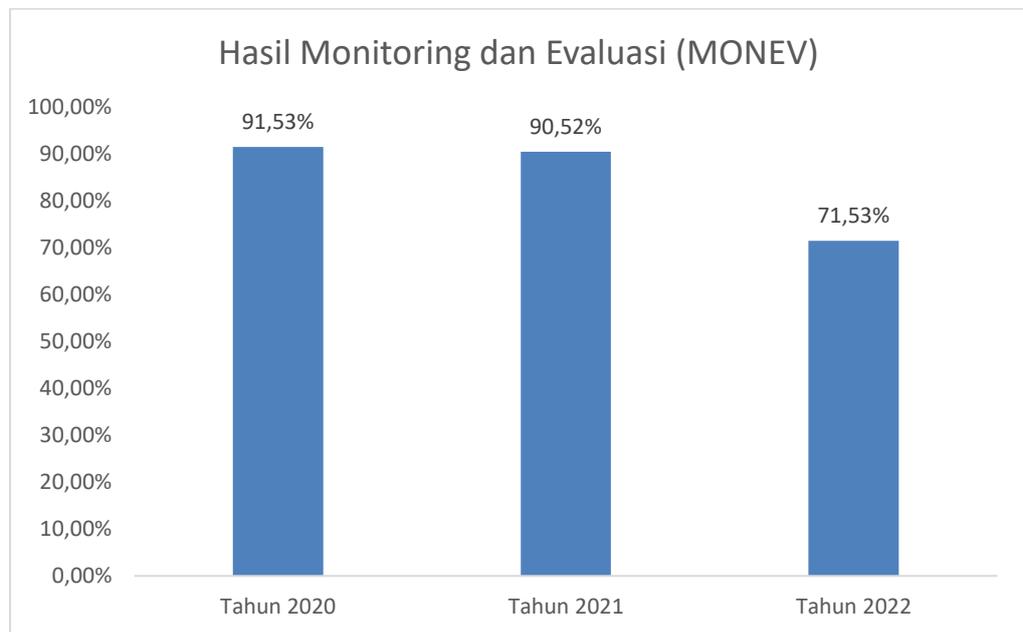
penyelidikan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir yang diajukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). KontraS menyampaikan permohonan ke PPID Kemensetneg untuk meminta diumumkannya secara resmi hasil laporan Tim Pencari Fakta kasus Meninggalnya Munir, tetapi informasi tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PPID Kemensetneg dikarenakan dokumen mengenai hal tersebut tidak dimiliki, dikuasai, dan diketahui oleh Kemensetneg. Mengetahui tanggapan dari PPID Kemensetneg, Pihak KontraS merasa tidak puas dan langsung mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Pusat pada tahun 2016. Hal tersebut telah tercantum pada berita di Kompas.com dan cnnindonesia.com.



Gambar 1.1 Berita kasus sengketa informasi Kemensetneg mengenai laporan TPF Munir

Adanya pemberitaan miring yang menyangkut pemerintah tentunya dapat berpotensi mempengaruhi citra lembaga pemerintahan itu di mata masyarakat. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hadir untuk menjamin hak seluruh masyarakat dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan negara agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi prosesnya. Namun, perlu ditekankan bahwa dalam undang-undang tersebut tidak semua informasi bersifat terbuka. Terdapat informasi yang juga dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan. Maka dari itu, sangat penting untuk setiap badan publik memahami urgensi keterbukaan informasi publik.

Sebagai lembaga yang diamanahkan untuk melakukan pengawasan kepada setiap badan publik, maka Komisi Informasi Pusat melakukan inovasi berupa kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik setiap tahunnya sebagai bentuk penilaian kinerja yang dilakukan oleh setiap badan publik, termasuk Kementerian Sekretariat Negara RI. Dari hasil Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik yang diperoleh dari Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat RI, diperoleh data bahwa Kemensetneg mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan. Berikut nilai Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Sekretariat Negara.



Gambar 1.2 Grafik Nilai Hasil MONEV Keterbukaan Informasi Publik Kemensetneg 2020-2023

Pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat bertujuan untuk mengukur sejauh mana UU No. 14 Tahun 2008 diimplementasikan oleh tiap badan publik, termasuk Kemensetneg. Tentu dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik dengan efektif dan efisien, tim Humas Kemensetneg memiliki strategi komunikasi yang membantu proses penyampaian informasi kepada publik agar informasi dapat tersampaikan dengan baik, tepat, dan optimal.

Upaya mendukung keterbukaan informasi publik di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara merupakan salah satu tanggung jawab yang diperankan oleh Biro Humas Kemensetneg. Hal ini tercermin dari berbagai kegiatan yang dijalankan seperti pengelolaan informasi publik, diseminasi informasi seputar kegiatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Kementerian Sekretariat Negara, ataupun melakukan berbagai kegiatan

seperti workshop, seminar, atau diskusi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang berbagai aspek kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah ataupun dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar permasalahan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai referensi diantaranya, pertama yaitu penelitian Skripsi “Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Kegiatan Humas PT. PLN Persero dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 oleh Intantya Purwoko Putrie dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian tersebut membahas mengenai strategi komunikasi yang telah dilakukan oleh Humas PT. PLN (Persero) terhadap pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif yang menggunakan teori implementasi (George C. Edwards), yang kemudian dipresentasikan kepada teori strategi komunikasi oleh Onong Uchjana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan Humas PT. PLN (Persero) telah dilakukan secara terencana dan sesuai dengan komponen strategi komunikasi. Seluruh komponen strategi komunikasi memberikan dampak dan kontribusi terhadap faktor implementasi.

Penelitian kedua yaitu Skripsi “Peran Humas Kementerian Sekretariat Negara dalam Menunjang Keterbukaan Informasi Publik” oleh Nurdiansyah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana peran, metode, serta hambatan humas Kementerian Sekretariat Negara untuk menunjang keterbukaan informasi publik. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan teori peran humas (Dozier) yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu peranan managerial dan peranan teknis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keterbukaan informasi publik terlihat dari upaya yang dilakukan seperti mengelola dan menyediakan informasi publik, diseminasi informasi menggunakan berbagai media, dan menjalin hubungan secara internal dan eksternal.

Ketiga, penelitian Skripsi “Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam Mensosialisasikan Program *Smart City*” oleh Aprilia Lianjani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Penelitian ini membahas mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan serta faktor pendukung, faktor penghambat, dan solusinya dalam mensosialisasikan program *smart city*. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan teori Hafied Cangara yang berkaitan dengan tahapan strategi komunikasi, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui divisi *Smart City* telah melakukan

sosialisasi dengan menggunakan lima tahapan, yaitu penelitian, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Dengan demikian, pada penelitian ini strategi komunikasi menjadi fokus yang akan diteliti dan dikaji dengan menggunakan teori strategi komunikasi dari Scoot M. Cutlip dan Allen H. Center. Adapun judul penelitian yang diangkat **“STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan, agar lebih terarah dan sistematis maka peneliti membatasi fokus penelitian ini yakni:

1. Bagaimana strategi komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara RI dalam implementasi keterbukaan informasi publik?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Humas Kemeterian Sekretariat Negara RI dalam implementasi keterbukaan informasi publik?

## **C. Tujuan & Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan strategi komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara RI dalam implementasi keterbukaan informasi publik.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang dihadapi Humas Kementerian Sekretariat Negara RI dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya:

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca sebagai bahan informasi yang diharapkan akan bermanfaat untuk penelitian lanjutan bagi peneliti atau pihak lain, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dari mata kuliah yang didapat di bangku perkuliahan dengan fakta yang didapat di lapangan

#### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang berguna bagi pembaca dalam mengetahui dan memahami strategi komunikasi yang dilakukan suatu badan publik dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Strategi Komunikasi**

Hovland, Janis & Kelley mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses dimana komunikator menyampaikan stimulus (berupa kata-kata) kepada khalayak dengan tujuan untuk mengubah dan membentuk perilaku (Putrie, 2015). Sederhananya, komunikasi menjadi proses sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih, dimana individu mengirimkan stimulus berupa pesan baik dalam bentuk verbal ataupun non-verbal kepada orang lain. Proses penyampaiannya pun dilakukan melalui saluran komunikasi, yang kemudian terjadi perubahan atau respon terhadap pesan yang disampaikan.

Rogers mendefinisikan bahwa strategi komunikasi adalah rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang besar melalui transfer ide-ide yang baru, sedangkan Middleton menyebutkan strategi komunikasi merupakan kombinasi terbaik dari seluruh elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima, hingga pada pengaruh (efek) yang dirancang agar dapat mencapai tujuan komunikasi yang optimal (Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi, 2013).

Menurut Onong Uchjana Effendy dalam bukunya *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik (2013)*, strategi komunikasi memiliki komponen-komponen yang menjadi dasar yang perlu juga diperhatikan disertai dengan faktor pendukung dan faktor penghambat dari setiap komponen tersebut. Komponen strategi komunikasi yang dijelaskan oleh Onong Effendy adalah :

### 1) Mengenali sasaran komunikasi

Komunikator perlu mempelajari siapa saja yang akan menjadi sasaran komunikasinya. Hal ini tentu bergantung pada tujuan komunikasi, apakah komunikasi ditujukan agar komunikan hanya sekedar mengetahui atau agar komunikan melakukan tindakan tertentu. Apabila hanya sekedar mengetahui, maka dilakukan metode informatif. Sedangkan, apabila untuk melakukan tindakan, maka menggunakan metode persuasive/instruktif. Dalam mengenali sasaran komunikasi, terdapat 2 (dua) faktor yang perlu diperhatikan, yaitu faktor referensi dan faktor situasi dan kondisi.

### 2) Pemilihan media komunikasi

Dengan kemajuan teknologi saat ini, media komunikasi sangatlah bervariasi, baik yang bersidat tradisional ataupun modern. Untuk mencapai sasaran komunikasi, komunikasi dapat memilih media yang akan digunakan, tergantung dari tujuan yang dicapai, pesan yang akan disampaikan, serta teknik yang akan digunakan. Tidak ada media yang paling baik dari semua media, hal ini dikarenakan setiap media mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

### 3) Pengkajian tujuan pesan komunikasi

Setiap pesan mempunyai tujuan tertentu, maka dengan adanya pengkajian tujuan pesan sangat bermanfaat untuk menentukan teknik seperti apa yang harus diambil. Pesan komunikasi terdiri atas isi pesan dan lambang/symbol.

#### 4) Peranan komunikator dalam komunikasi

Peranan komunikator memiliki peranan dalam keberhasilan suatu proses komunikasi. Menurut Onong, ada 2 (dua) faktor yang mendukung, yaitu daya tarik sumber dan kredibilitas.

Menurut Ronald D. Smith (2002) dalam bukunya *Strategic Planning for Public Relation* dijelaskan bahwa ada 4 (empat) tahap rencana strategi yang dilakukan oleh seorang *public relations* dalam menjalankan perannya. Keempat tahap ini disebut dengan ROPE (*Research, Objectives, Programming, Evaluation*) (Erlistyarini, 2018).

Strategi perencanaan yang dikemukakan oleh Ronald D. Smith sebenarnya hampir sama dengan model perencanaan komunikasi yang digagas oleh Scoot M. Cutlip dan Allen H. Center dalam (Rizki, Musfialdy, & Miftahuddin, 2019) yang dapat menjadi landasan atau acuan untuk melakukan pelaksanaan, diantaranya :

##### a) Penemuan fakta (*Fact Finding*)

Langkah awal ini melibatkan proses pengkajian atau pengenalan situasi, pemantauan pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku yang terkait dengan tindakan dan kebijakan suatu lembaga/organisasi. Langkah untuk menjawab “Apa yang sedang terjadi sekarang?”

##### b) Perencanaan (*Planning*)

Informasi yang terkumpul pada langkah pertama kemudian digunakan untuk membuat sebuah keputusan mengenai publik, sasaran, tindakan dan strategi komunikasi, taktik, dan tujuan program. Langkah kedua ini berusaha menjawab “Kita telah mempelajari situasi berdasarkan apa saja

yang perlu diubah, dilakukan, ataupun yang dikatakan.” Proses ini menyusun strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan komunikasi perlu untuk memperhatikan elemen-elemen komunikasi, seperti menentukan komunikator, pesab, media, sasaran dan efek.

c) Aksi dan Komunikasi (*Action and Communication*)

Setelah perencanaan telah dilakukan, beralih ke langkah ketiga yang melibatkan program dari tindakan dan komunikasi yang telah dirancang sebelumnya untuk mencapai tujuan yang spesifik. Pertanyaan pada Langkah ini, “Siapa yang akan melakukan dan memberitahukan program? Kapan dilakukan? Dimana dilakukan? Dan bagaimana caranya?”

d) Evaluasi (*Evaluation*)

Tahap ini menjadi tahapan akhir yang melibatkan kesiapan penilaian, hasil implementasi dari usaha-usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dilanjutkan ataupun diberhentikan berdasarkan pertanyaan, “Bagaimana yang telah kita kerjakan”.

## 2. Hubungan Masyarakat

Hubungan Masyarakat atau disingkat Humas merupakan terjemahan dari *public relations*. Namun dari penggunaan kata, sebutan “Humas” lebih erat kaitannya dengan instansi pemerintah. Menurut Cutlip Centre & Broom (2006) mendefinisikan *public relations* sebagai “*the planned effort to influence opinion through good character and responsible performance, based on mutually satisfactory two-way communication*”, dapat disimpulkan bahwa *public relations*

adalah upaya-upaya terencana yang dilakukan untuk membujuk publik agar mendukung organisasi dengan asas komunikasi dua arah yang saling memuaskan.

Grunig (1989) mendefinisikan bahwa *public relations* adalah penggunaan komunikasi untuk memanupulasi publik demi kepentingan organisasi. Menurut (Effendy, 2006), *public relations* adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerja sama dan pemenuhan kepentingan bersama (Fahri & Unde, 2018).

Bagian humas yang bekerja pada institusi pemerintah atau biasa dikenal dengan humas pemerintah merupakan aktivitas lembaga atau individu yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik (Nurdiansyah, 2018). Humas pemerintah sangat berperan penting dalam melakukan kegiatan komunikasi, koordinasi, dan menyebarkan berbagai data dan informasi publik yang dibutuhkan oleh stakeholders (Fayiz, 2022). Lembaga yang ada baik pada tingkat pusat hingga tingkat daerah tentu dilengkapi dengan bagian humas yang berfungsi untuk mengelola informasi dan opini publik.

Millet menyatakan bahwa Humas memiliki beberapa tugas utama, yaitu mempelajari keinginan publik, menciptakan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, memberikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, serta menciptakan citra baik pemerintah di mata publik. Humas sebagai ujung tombak informasi pemerintah diharuskan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Fahri & Unde, 2018).

Menurut Dozier, Humas memiliki peran penting untuk pemahaman fungsi humas dan komunikasi organisasi, sehingga perannya dibedakan menjadi dua, yaitu peranan managerial (*communication manager role*) dan peranan teknis (*communication technical role*). Adapun peranan managerial atau dikenal dengan peranan Tingkat manajemen dibedakan menjadi 3 peranan, yaitu *expert prescriber communication*, *problem solving facilitator*, dan *communication facilitator* (Nurdiansyah, 2018). Berdasarkan 3 peranan tersebut, apabila diuraikan lebih jauh terdapat 4 peranan, diantaranya :

- a. Penasihat Ahli (*Expert prescriber*) : *Public relations* membantu manajemen dengan pengalaman dan keterampilan mereka untuk mencari solusi bagi penyelesaian masalah humas yang dihadapi oleh suatu perusahaan, lembaga atau organisasi.
- b. Fasilitator komunikasi (*Communications fasilitator*) : *Public relations* berperan sebagai mediator informasi antara perusahaan dengan publiknya.
- c. Fasilitator proses pemecahan masalah (*Problem solving process fasilitator*): *Public relations* membantu manajemen melalui kerjasama dengan bagian lain dalam perusahaan untuk menemukan pemecahan masalah yang terbaik untuk masalah *public relations* secara rasional dan profesional.
- d. Teknisi komunikasi (*Technician communications*) : *Public relations* sebagai *journalist in resident* yang hanya menyediakan layanan teknis komunikasi. Praktisi teknisi komunikasi ditujukan untuk menulis dan

menyunting majalah karyawan, menulis siaran pers, dan cerita feature, mengembangkan isi situs web, dan berurusan dengan kontak media.

### **3. Implementasi**

Secara etimologis, implementasi merupakan suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Menurut Nurdin Usman dalam buku Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar sebuah aktivitas semata, tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.

Sedangkan menurut Hanifah Harsono (2002), implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dilakukan dalam rangka penyempurnaan suatu program (Pramesti, 2019). Implementasi dapat dimaknai sebagai proses pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga kegiatan yang telah dijalankan itu dapat memberikan akibat/dampak bagi masyarakat.

Tolak ukur keberhasilan dari implementasi kebijakan publik tak hanya ditunjukkan berdasarkan banyaknya unit organisasi yang terlibat dalam kebijakan tersebut saja, tetapi terdapat faktor implementasi yang tentu saling berkaitan satu sama lain. Adapun faktor implementasi menurut George Edward III, terdiri atas faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Putrie, 2015).

#### **4. Keterbukaan Informasi Publik**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keterbukaan adalah hal terbuka yang menjadi landasan utama dalam berkomunikasi, sedangkan informasi dikutip dari UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 1 dijelaskan bahwa :

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik fakta, data, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non-elektronik.

Sementara itu, apabila merujuk kembali pada Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2008, diterangkan pula defnisi informasi publik yakni informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Perlu dipahami bahwa hak memperoleh informasi merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka untuk diawasi publik agar penyelenggaraan negara semakin dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik (Arfian, 2017). Dikarenakan tuntutan demokrasi serta transparansi mengantarkan pemerintah untuk menetapkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai payung hukum yang berlaku.

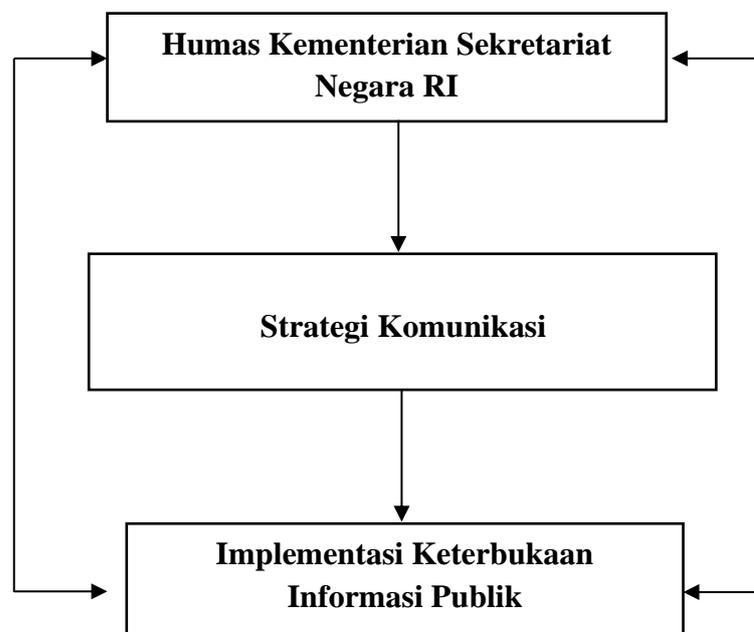
Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Namun, terdapat juga informasi publik yang dikecualikan yaitu informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas (UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 3).

Dalam perwujudan keterbukaan informasi, undang-undang yang mengikat juga mengamanatkan kepada setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi pejabat penanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di suatu badan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merangka konsep pemikitan penelitian yang dilakukan sebagai berikut :

+



Gambar 1.3 Kerangka Pikir

## **E. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari multitafsir dalam penelitian ini, peneliti memberikan pemahaman dan batasan dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi adalah bagian dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi yang menunjukkan gambaran operasional untuk mencapai tujuan yang optimal.
2. Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara yang wajib diimplementasikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat oleh seluruh badan-badan publik yang telah terdaftar dengan menyediakan segala bentuk informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik tersebut dan tetap sesuai dengan undang-undang yang terikat, yakni Undang-Undang No. 14 tahun 2008.
3. Hubungan masyarakat (Humas) adalah unsur pelaksana yang menjalankan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi persuasif, efektif, dan efisien dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi positif instansi pemerintah
4. Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden. Umumnya, tugas Kementerian Sekretariat Negara adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Agustus hingga Desember 2023 yang dilakukan pada Kantor Pusat Kementerian Sekretariat Negara bagian Biro Hubungan Masyarakat, Jl. Veteran No. 17-18, Jakarta Pusat.

### 2. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian akan dilakukan secara langsung dan mendalam melalui pengamatan objektif. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif, yakni penelitian dengan menggambarkan, menganalisa, serta menginterpretasikan data yang ditemukan terkait bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Humas Kementerian Sekretariat Negara dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

### 3. Teknik Penentuan Informan

Peneliti memilih menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Teknik ini digunakan dengan memilih orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau data yang dibutuhkan dan berguna untuk pemecahan masalah yang diteliti. Fokus informan penelitian ini adalah Staff Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, yang dianggap memahami permasalahan untuk dipaparkan kepada penulis. Penulis menetapkan beberapa informan yang terdiri atas :

- Faisal Fahmi S.H., M.H. (Sekretaris PPID Utama Kemensetneg sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya)
- Oky Tri Handoko S.S. (Staf PPID Utama Bidang Pelayanan Informasi Publik, Analis Hubungan Masyarakat)
- Wulan Kurniasih (Staf PPID Utama Bidang Pendokumentasian dan Arsip)
- Akhmad Firmannamal, S.Sos., M.Commun., Ph.D. (Kepala Bidang Diseminasi Informasi, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya)

#### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber yang diamati dan dicatat. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, internet, ataupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### a. Data Primer :

Wawancara Mendalam (in depth interviewing), yaitu proses pencarian data dengan melakukan tanya jawab secara terbuka dan tidak terstruktur dengan informan, sehingga data yang diperoleh detail, akurat dan tepat. Melalui wawancara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai strategi komunikasi Humas Kementerian Sekretariat Negara dalam implementasi keterbukaan informasi publik.

b. Data Sekunder :

Studi Kepustakaan, yaitu data yang ditemukan berdasarkan hasil pencarian literature bacaan, buku, majalah, situs internet, ataupun sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti guna melengkapi dan mendukung penelitian yang dilakukan.

**E. Teknik Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data tipe kualitatif dengan memakai teknik analisis data Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010), terdapat 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, diantaranya :

- a. Reduksi data : Proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data yang ditemukan dari berbagai sumber.
- b. Penyajian data : Paparan data yang dilakukan dengan menyajikan data hasil wawancara dalam bentuk narasi (naratif), serta data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi. Menarik kesimpulan dan verifikasi
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi : Proses pengungkapan makna dari hasil data yang telah dikumpulkan. Dari data yang didapatkan akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi kembali.